

Moderasi Beragama dalam Bernegara di Indonesia

Mujar Ibnu Syarif¹, Arip Purkon²

¹Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 13, 2024

Revised September 20, 2024

Accepted September 27, 2024

Available online 03 Oktober, 2024

Kata Kunci:

Moderasi beragama, Indonesia, radikalisme, toleransi.

Keywords:

Religious Moderation, Indonesia, Radicalism, Tolerance



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Religious moderation is an important concept in maintaining harmony and social stability in Indonesia, a country with a very wide diversity of religions and cultures. This study aimed to examine the concept of religious moderation in Indonesia. Using a literature review approach, this paper analyzed various sources of religious moderation literature. The results of the study concluded that religious moderation in Indonesia is driven by several main factors, including the values of Pancasila, the role of religious figures and organizations, and government policies through the Ministry of Religious Affairs. Religious moderation is considered a solution to prevent radicalization, promote tolerance between religious communities, and maintain social cohesion. Religious moderation in Indonesia must continue to be supported by various parties, including the government, community organizations, and religious leaders, through inclusive policies, moderate religious education, and constructive interfaith dialogue.

ABSTRACT

Moderasi beragama merupakan konsep penting dalam menjaga kerukunan dan stabilitas sosial di Indonesia, negara dengan keragaman agama dan budaya yang sangat luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep moderasi beragama di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka, tulisan ini menganalisis berbagai sumber literatur yang terkait dengan moderasi beragama. Hasil kajian menyimpulkan bahwa moderasi beragama di Indonesia didorong oleh beberapa faktor utama, termasuk nilai-nilai Pancasila, peran tokoh dan organisasi keagamaan, serta kebijakan pemerintah melalui Kementerian Agama. Moderasi beragama dianggap sebagai solusi untuk mencegah radikalisasi, mempromosikan toleransi antar umat beragama, dan menjaga kohesi sosial. Moderasi beragama di Indonesia harus terus didukung oleh berbagai pihak, baik pemerintah, organisasi masyarakat, maupun pemuka agama, melalui kebijakan inklusif, pendidikan agama yang moderat, dan dialog lintas agama yang konstruktif.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang hampir tidak ada tandingannya di dunia. Selain enam agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat, ada ratusan bahkan ribuan suku, bahasa dan aksara daerah, serta kepercayaan lokal di Indonesia. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, secara keseluruhan jumlah suku dan sub suku di Indonesia adalah sebanyak 1331, meskipun pada tahun 2013 jumlah ini berhasil diklasifikasi oleh BPS sendiri, bekerja sama dengan Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), menjadi 633 kelompok-kelompok suku besar (Editorial Team. (n.d.), 2020).

Terkait jumlah bahasa, Badan Bahasa pada tahun 2017 juga telah berhasil memetakan dan memverifikasi 652 bahasa daerah di Indonesia, tidak termasuk dialek dan sub-dialeknya. Sebagian bahasa daerah tersebut memiliki jenis aksaranya sendiri, seperti Jawa, Sunda, Jawa Kuno, Sunda Kuno, Pegon, Arab-Melayu atau Jawi, Bugis-Makassar, Lampung, dan yang lainnya. Sebagian aksara tersebut digunakan oleh lebih dari satu bahasa yang berbeda, seperti aksara Jawi yang juga digunakan untuk menuliskan bahasa Aceh, Melayu, Minangkabau dan Wolio (Editorial Team. (n.d.), 2020).

Struktur dan komposisi penduduk Indonesia berdasarkan kelompok suku bangsa menurut Sensus Penduduk 2010 memperlihatkan Suku Jawa yang berasal dari Pulau Jawa bagian tengah hingga timur sebagai kelompok suku terbesar dengan populasi sebanyak 85,2 juta jiwa atau sekitar 40,2 persen dari populasi penduduk Indonesia. Yang disebut Suku Jawa ini sudah mencakup Suku Osing, Tengger, Samin, Bawean atau Boyan, Naga, Nagaring dan suku-suku lainnya. Suku bangsa terbesar kedua adalah Suku Sunda yang berasal dari Pulau Jawa bagian barat dengan jumlah mencapai 36,7 juta jiwa atau 15,5 persen. Suku Batak menyusul sebagai terbesar ketiga dengan jumlah mencapai 8,5 juta jiwa atau 3,6 persen yang berasal dari Pulau Sumatra bagian tengah utara. Suku terbesar keempat adalah Suku asal Sulawesi selain Suku Makassar, Bugis, Minahasa dan Gorontalo. Jumlah terbesar keempat ini sendiri

*Corresponding author

E-mail addresses: arippurkon@gmail.com

merupakan gabungan dari 208 jenis suku bangsa Sulawesi. Untuk terbesar kelima adalah Suku Madura yang berasal dari Pulau Madura di sebelah timur utara pulau Jawa yang populasinya menyebar cepat di berbagai wilayah Indonesia hingga mencapai 7,18 juta jiwa atau sekitar 3,03 persen dari populasi penduduk Indonesia (Editorial Team. (n.d.), 2020).

Indonesia adalah negara terbesar di dunia dalam hal populasi Muslim. Sensus terakhir pada tahun 2010 melaporkan bahwa lebih dari 87% orang Indonesia menyatakan diri sebagai Muslim, 9,87% Kristen, 1,69% Hindu, 0,72% Buddha, sementara 0,56% mempraktikkan agama lain. Pemerintah Indonesia secara resmi mengakui enam agama, yaitu, Islam, Protestan, Katolik Roma, Budha, Hindu, dan Konfusianisme (Heriyanto, 2020).

Dalam konteks kebudayaan, bangsa Indonesia membentuk diri menjadi satu dalam keragaman. Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa baru yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang semua pada dasarnya adalah pribumi. Artinya, semua adalah suku-suku bangsa yang, meskipun dahulu kala bermigrasi dari tempat lain, secara turun-temurun telah tinggal di wilayah geografis Indonesia sekarang ini, dan merasa bahwa itu adalah tanah airnya. Bangsa baru ini terbentuk karena suatu kemauan politik untuk menyatukan diri, dan dengan itu membangun sebuah negara serta membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan oleh bangsa lain (Sedyawati, 2007).

Indonesia dengan keanekaragaman budaya, agama, suku, dan bahasa yang dimilikinya menyadari bahwa dirinya adalah salah satu bangsa yang memiliki masyarakat multikultural. Keanekaragaman tersebut menjadi sebuah rahmat tersendiri jika dapat dikelola dengan baik, bahkan menjadi keunikan dan kekuatan tersendiri. Namun di saat bersamaan, realitas pluralitas demikian itu juga dapat menjadi tantangan besar jika tidak disikapi dengan bijak dan arif, bahkan juga dapat menjadi ancaman perpecahan dan perseteruan yang dapat mengoyak keamanan sosial. Sebagaimana dalam kontestasi keberagaman di nusantara yang seringkali terjadi gesekan antara kelompok dengan kelompok lain yang mana di antaranya disebabkan oleh perbedaan paham keagamaan dan paradigma berpikir. Kelompok tersebut dapat dipetakan menjadi kelompok eksklusivisme dan kelompok yang lain adalah liberalisme.

Ekklusivisme adalah paradigma berfikir yang cenderung tertutup terhadap keanekaragaman. Sementara liberalisme adalah sebaliknya, yaitu paham yang memperjuangkan kebebasan di semua aspek. Kedua kelompok tersebut seringkali memperlihatkan wajah Islam yang terkesan kurang bersahaja dan mengandung nilai rahmat (Darlis, 2016).

Perseteruan kedua kubu yang sangat berlawanan tersebut menjadi ancaman serius bagi tatanan sosial baik, dalam konteks regional, nasional bahkan internasional, lebih khusus lagi adalah ancaman bagi kebhinekaan di tengah masyarakat yang majemuk. Dampak yang nyata dalam masyarakat akibat dari perseteruan kedua kubu tersebut adalah sejumlah tindakan intoleransi yang terjadi di tengah masyarakat (Komnasham, 2020). Hujatan yang mengarah pada anarkisme antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, dan sudah pasti mengoyak rasa persatuan dan kesatuan karena perbedaan yang ada disikapi dengan cara yang kurang arif sehingga terkadang tidak lagi menjadi rahmat tapi malah menjadi laknat.

Di tengah kondisi seperti itu, kehadiran moderasi Islam diharapkan dapat memberikan solusi dengan karakter cara beragama yang ditawarkan menjadi solusi. Moderasi Islam tidak berarti bahwa posisi netral yang abu-abu sebagaimana yang sering dialamatkan kepada term tersebut, tidak juga berarti bahwa moderasi Islam identik dengan bias paradigma Barat yang cenderung memperjuangkan kebebasan yang berlebihan dan seolah tanpa batas, akan tetapi moderasi Islam yang dimaksud adalah nilai-nilai universal seperti keadilan, persamaan, kerahmatan, dan keseimbangan yang dimiliki oleh agama Islam yang memiliki akar sejarah yang kuat dalam tradisi Nabi dan Sahabat. Moderasi Islam seperti itu kemudian dapat dijumpai dalam setiap disiplin keilmuan Islam, mulai dari aspek akidah, syariah, tasawuf, tafsir hadis dan dakwah.

METODE

Penelitian dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk kajian pustaka tentang moderasi beragama di Indonesia. Kajian dilakukan melalui pengumpulan dan analisis sumber-sumber data yang relevan, seperti buku, jurnal akademik, artikel, laporan penelitian, kebijakan pemerintah, serta dokumen-dokumen terkait moderasi beragama. Setelah literatur terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis isi untuk mengidentifikasi tema, pola, atau argumen utama terkait moderasi beragama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keragaman Masyarakat Indonesia dan Tantangannya

Indonesia dengan keragamannya, meliputi suku, budaya, tradisi, bahasa, sampai kepada keragaman agamanya seringkali menimbulkan konflik disebabkan perbedaan tersebut dengan berbagai

faktor yang melingkupinya. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah langkah yang progresif dalam menangani isu-isu keragaman yang sewaktu-waktu bisa meledak dan menimbulkan kerugian yang besar.

Selama dua dekade terakhir, aspek-aspek kekerasan Islam di Indonesia secara masif menjadi sorotan publik. Wajah Islam yang diidentikkan dengan kekerasan tidak dapat terbendung serta menarik perhatian para penulis untuk mengkajinya. Meminjam istilah Luthfi Assyaukanie (Assyaukanie, 2011), semacam ada anggapan bahwa Islam Indonesia -yang dikenal sebagai Islam inklusif dan toleran, misalnya- telah ikut terseret pula ke dalam arus global fundamentalisme agama dan mesti segera dilakukan pembenahan. Walaupun fundamentalisme dan ekstremisme bukanlah sesuatu yang sama sekali baru, tetapi ia cukup menjadi titik penting dalam sejarah dunia. Ia merepresentasikan diri sebagai partisan yang tidak memiliki nilai perikemanusiaan untuk sebuah pertumpahan darah, seperti perang sipil di Syiria, genosida Muslim Rohingya di Myanmar, serta perselisihan Syiah dan Sunni di Pakistan yang tidak berkesudahan (Hanapi, 2014).

Di Indonesia, meskipun tidak ada peristiwa seperti pada tiga negara tersebut, bukan berarti kemelut ekstremitas tidak ada. Tetapi berbeda dengan negara lain, di Indonesia, ekstremitas tidak memihak. Jika di Myanmar arus ekstrem berwujud genosida Muslim Rohingnya, artinya searus, maka di negeri ini arus ekstrem berjalan secara dua pihak yang berlawanan. Dengan kata lain, dua sisi ekstrem saling berbenturan, antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Akibatnya yang mengemuka bukanlah perang sipil seperti di Syiria, melainkan pelintiran kebencian (*hate spin*) antarpartisan (George, 2017). Mendiagnosa hal tersebut menjadi arus baru ekstremitas, dan agitasinya tidak sama sekali independen. Yang paling menarik untuk dicatat, agama menjadi senjata paling ampuh dalam pelintiran kebencian. Sentimen keagamaan dipakai dalam percaturan politik kekuasaan justru oleh para pimpinan politik dan pemuka agama itu sendiri. Boleh saja hari ini tidak terjadi perang seperti di negara Islam tersebut, tetapi bukanlah mustahil bahwa suatu hari nanti, jika polemik antarpartisan itu terus berlanjut, Indonesia akan mengalami hal serupa. Dalam situasi mendesak tersebut, dan oleh karena yang paling rentan adalah sentimen agama, maka moderasi Islam menjadi agenda yang secara masif ditawarkan.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan konflik antar umat beragama terjadi di Indonesia, antara lain faktor tersebut adalah:

Pertama, menguatnya kelompok-kelompok keagamaan berhaluan tekstual radikal. Penyebaran berbagai paham keagamaan dan aliran, banyak ditemui pada kalangan Islam dan Kristen di Indonesia. Di Islam, muncul kelompok-kelompok yang senantiasa mengungkapkan gagasan keharusan adanya penerapan syariat Islam secara tekstualis di Indonesia, sementara di Kristen muncul kelompok-kelompok yang gencar menyebarkan misinya kepada masyarakat non-kristen (Setiawan, 2012). Nasaruddin Umar mengatakan bahwa meskipun pemahaman secara literal dan tekstual terkadang tidak dapat dilepaskan, akan tetapi model pemahaman literal dan tekstual pada gilirannya dapat melahirkan tindakan yang terkesan tidak toleran, anarkis, dan cenderung destruktif (Umar, 2014).

Kedua, sikap eksklusif, dengan memandang diri lebih benar dan suci, serta menutup mata terhadap kebenaran-kebenaran agama lain (Al-Qaradhawi, 2017). Yang lebih berbahaya lagi, jika seseorang ingin mewajibkan satu pendapat kepada orang lain dengan dalih tuduhan berbuat *bid'ah* (mengada-ada), mendustakan agama, kufur dan sesat (Al-Qaradhawi, 2017).

Ketiga, pendangkalan dari umat Islam sendiri, dimana hal itu terjadi disebabkan mereka yang terlibat atau terpengaruh dalam gerakan-gerakan Islam radikal pada umumnya mereka yang berlatar belakang pendidikan ilmu-ilmu ekonomi dan eksakta. Latar belakang seperti itu mengakibatkan pikiran mereka penuh dengan hitungan-hitungan matematik dan ekonomis yang rasional dan tidak adanya kesempatan untuk mengkaji Islam secara lebih mendalam (Umar, 2014).

Keempat, Pemeluk agama yang mengidap tirani mayoritasisme berjubah agama. Perilaku arogan, superior, despotik, adalah ekspresi mayoritasisme yang meniranisasi dirinya sebagai pihak yang paling berkuasa, sementara pihak lain yang berkedudukan minoritas tidak boleh mengekspresikan perilaku beragama yang lebih. Dengan mengatasnamakan seperangkat dalil dan teks-teks keagamaan, berbagai kelompok mayoritas melakukan tindakan represif terhadap kelompok-kelompok minoritas (Ghufroon, 2016).

Secara umum, agama pada umumnya lebih khusus Islam di manapun membawa misi kebaikan, perdamaian, dan rahmat bagi semesta alam. Agama secara universal sangat penting dan fundamental dalam kehidupan umat manusia. Agama memiliki nilai sangat penting di tengah kehidupan yang profan (duniawi), yakni "kesatuan sistem keyakinan dan praktek-praktek yang berhubungan dengan suatu yang sakral, ... di mana semua orang tunduk kepadanya atau sebagai tempat masyarakat membeberikan kesetiannya". Agama secara khusus berfungsi sebagai *the sacred canopy* (teras pelindung suci) atau "*nomos*" (menciptakan keteraturan hidup) yang membuat manusia terbebas dari *chaos* atau *anomie* yakni segala sesuatu yang kacau atau ketidakteraturan (Berger dan Lukmann, 1990). Dalam masyarakat modern yang sekuler sekalipun agama tetap relevan dan penting dalam kehidupan umat manusia,

meskipun ekspresi dan aktualisasinya tidak bersifat langsung dan dalam kehidupan bernegara terjadi pemisahan antara domain publik dan agama (Wilson, 1966).

Islam dan Budaya Indonesia

Sejak kedatangan Islam di bumi Indonesia, sepanjang menyangkut proses penyebarannya sebagai agama dan kekuatan kultur, sebenarnya ia telah menampakkan keramahannya. Dalam konteks ini, Islam disebarkan dengan cara damai, tidak memaksa pemeluk lain untuk masuk agama Islam, menghargai budaya yang tengah berjalan, dan bahkan mengakomodasikannya ke dalam kebudayaan lokal tanpa kehilangan identitasnya. Ternyata sikap toleran inilah yang banyak menarik simpatik masyarakat Indonesia pada saat itu untuk mengikuti ajaran Islam. Sementara itu, Walisongo adalah arsitek yang handal dalam pembumian Islam di Indonesia (Hanapi, 2018).

Menurut catatan Abdurrahman Mas'ud (Mas'ud, 2006), Walisongo merupakan agen-agen unik Jawa pada abad XV-XVI yang mampu memadukan aspek-aspek spiritual dan sekuler dalam menyiarkan Islam. Posisi mereka dalam kehidupan sosiokultural dan religius di Jawa begitu memikat hingga bisa dikatakan Islam tidak pernah menjadi *the religion of Java* jika sufisme yang dikembangkan oleh Walisongo tidak mengakar dalam masyarakat. Rujukan ciri-ciri ini menunjukkan ajaran Islam yang diperkenalkan Walisongo di Tanah Jawa hadir dengan penuh kedamaian, walaupun terkesan lamban tetapi meyakinkan. Berdasarkan fakta sejarah, bahwa dengan cara menoleransi tradisi lokal serta memodifikasinya ke dalam ajaran Islam dan tetap bersandar pada prinsip-prinsip Islam, agama baru ini dipeluk oleh bangsawan-bangsawan serta mayoritas masyarakat Jawa di pesisir utara. Transmisi Islam yang dipelopori Walisongo merupakan perjuangan brilian yang diimplementasikan dengan cara sederhana, yaitu menunjukkan jalan dan alternatif baru yang tidak mengusik tradisi dan kebiasaan lokal, serta mudah ditangkap oleh orang awam dikarenakan pendekatan-pendekatannya konkrit dan realistis, tidak rumit, dan menyatu dengan kehidupan masyarakat. Model ini menunjukkan keunikan sufi Jawa yang mampu menyerap elemen-elemen budaya lokal dan asing, tetapi dalam waktu yang sama masih berdiri tegar di atas prinsip-prinsip Islam (Mas'ud, 2006).

Demikian pula dikatakan, bahwa proses pergumulan Islam dengan kebudayaan setempat yang paling intensif terlihat pada zaman Walisongo. Masa ini merupakan masa peralihan besar dari Hindu-Jawa yang mulai pudar menuju fajar zaman Islam. Keramahan terhadap tradisi dan budaya setempat itu diramu menjadi watak dasar budaya Islam pesantren. Wajah seperti itulah yang menjadikan Islam begitu mudah diterima oleh berbagai etnis yang ada di Nusantara. Hal ini terjadi karena ada kesesuaian antara agama baru (Islam) dan kepercayaan lama. Setidaknya, kehadiran Islam tidak mengusik kepercayaan lama, tetapi sebaliknya kepercayaan tersebut diapresiasi dan kemudian diintegrasikan ke dalam doktrin dan budaya Islam (Mun'im DZ, 2007).

Meski agama yang paling banyak dipeluk dan dijadikan sebagai pedoman hidup oleh masyarakat Indonesia berjumlah enam agama, yakni: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, namun keyakinan dan kepercayaan keagamaan sebagian masyarakat Indonesia tersebut juga diekspresikan dalam ratusan agama leluhur dan penghayat kepercayaan. Jumlah kelompok penghayat kepercayaan, atau agama lokal di Indonesia bisa mencapai angka ratusan bahkan ribuan.

Selain agama dan kepercayaan yang beragam, dalam tiap-tiap agama pun terdapat juga keragaman penafsiran atas ajaran agama, khususnya ketika berkaitan dengan praktik dan ritual agama. Umumnya, masing-masing penafsiran ajaran agama itu memiliki penganutnya yang meyakini kebenaran atas tafsir yang dipraktikkannya (Departemen Agama RI, 2012).

Moderasi Beragama di Indonesia

Untuk saat ini dan ke depan, gerakan moderasi beragama yang diusung oleh Kementerian Agama menemukan momentumnya. *Framing* moderasi beragama penting dalam mengelola kehidupan beragama pada masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural.

Menariknya, ternyata semua agama yang diakui di Indonesia juga mengenal ajaran moderasi beragama. Dalam Islam misalnya, terdapat konsep *washatiyyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* bisa disebut *wasith*.

Dalam tradisi Kristen, moderasi beragama menjadi cara pandang untuk menengahi ekstremitas tafsir ajaran Kristen yang dipahami sebagian umatnya. Salah satu kiat untuk memperkuat moderasi beragama adalah melakukan interaksi semaksimal mungkin antara agama yang satu dengan agama yang lain, antara aliran yang satu dengan aliran yang lain dalam internal umat beragama.

Moderasi beragama juga dapat dilihat dalam perspektif Gereja Katolik. Dalam Gereja Katolik, istilah "moderat" tidak biasa. Yang dipakai adalah "terbuka" terhadap "fundamentalis" dan "tradisionalis" (yang menolak pembaruan dalam pengertian Gereja Katolik).

Adapun dalam tradisi Hindu, akar ruh moderasi beragama, atau jalan tengah, dapat ditelusuri hingga ribuan tahun ke belakang. Periode itu terdiri dari gabungan empat *Yuga* yang dimulai dari *Satya*

Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga dan Kali Yuga. Dalam setiap *Yuga* umat Hindu mengadaptasikan ajaran-ajarannya sebagai bentuk moderasi. Untuk mengatasi kemelut zaman dan menyesuaikan irama ajaran agama dengan watak zaman, moderasi tidak bisa dihindari dan menjadi keharusan sejarah.

Praktik agama yang dilaksanakan umat Hindu Indonesia pada zaman modern seperti sekarang ini adalah *Puja Tri Sandhya* dan *Panca Sembah*. Keduanya menjadi poros utama pembangunan peradaban Hindu Indonesia sejak terbentuknya *Parisadha* di tahun 1960-an. Praktik kedua teologi ini berkelindan dengan banyak praktik agama Hindu lain. Seni dan ritual menjadi penunjang yang menyemarakkan *Puja Tri Sandhya* dan *Panca Sembah*. Berkaitan dengan moderasi beragama, ajaran agama Hindu yang terpenting adalah susila, yaitu bagaimana menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia, yang menjadi salah satu dari tiga penyebab kesejahteraan. Kasih sayang adalah hal yang utama dalam moderasi di semua agama.

Dalam Agama Budha, esensi ajaran moderasi beragama dapat dilihat dari pencerahan Sang Buddha yang berasal dari Sidharta Gautama. Ia mengikrarkan empat prasetya, yaitu berusaha menolong semua makhluk, menolak semua keinginan nafsu keduniawian, mempelajari, menghayati, dan mengamalkan Dharma, serta berusaha mencapai Pencerahan Sempurna.

Moderasi beragama juga mengakar dalam tradisi agama Khonghucu. Umat Khonghucu yang *junzi* (beriman dan luhur budi) memandang kehidupan ini dalam kaca mata *yin yang*, karena *yin yang* adalah filosofi, pemikiran dan spiritualitas seorang umat Khonghucu yang ingin hidup dalam dao. *Yin yang* adalah Sikap Tengah, bukan sikap ekstrem. Sesuatu yang kurang sama buruknya dengan suatu yang berlebihan.

Konsep moderasi beragama menjadi sangat penting karena sikap tersebut akan mendorong kepada sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan terhadap praktik keagamaan orang lain yang memiliki keyakinan berbeda (inklusif). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama tersebut akan menghindarkan seseorang dari sikap ekstrem yang berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. moderasi beragama adalah solusi terhadap dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub ultrakonservatif atau ekstrem kanan di satu sisi serta di sisi lain liberal atau ekstrem kiri (Kementerian Agama RI, 2019).

Indonesia harus memiliki cara berpikir dan bernarasi sendiri agar tidak terjebak dalam sekat ruang-ruang sosial. Pada titik ini, moderasi sosio-religius sebagai integrasi ajaran inti agama dan keadaan masyarakat multikultural di Indonesia dapat disinergikan dengan kebijakan-kebijakan sosial yang diambil oleh pemerintah negara. Kesadaran ini harus dimunculkan agar generasi bangsa ini bisa memahami bahwa Indonesia ada untuk semua (Sutrisno, 2015).

Perbincangan toleransi beragama tetap penting terlebih dalam konteks bangsa Indonesia yang majemuk. Kemajemukan dalam agama, bahasa, etnis, suku, dan adat istiadat memerlukan sebuah sofistikasi manajemen konflik sehingga konflik dengan ketegangan secara berkesinambungan dapat dikelola dengan baik. Elemen-elemen kemajemukan tersebut, baik sendirian maupun bersama-sama, dapat mengancam integrasi bangsa. Perlu diakui bahwa elemen agama berkontribusi amat besar bagi munculnya disintegrasi sosial dibanding elemen lain.

Sejarah konflik dan ketegangan di masyarakat Indonesia terlalu sering dipicu oleh masalah-masalah yang terkait atau dikait-kaitkan dengan agama (seperti kerusuhan di Poso, Palu, Ambon untuk menyebut beberapa diantaranya). Atau, agama sering "mengilhami" tindak-tanduk kekerasan. Apalagi pada momen-momen hari besar keagamaan seperti lebaran dan hari natal (seperti peledakan bom ke tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat umum). Terlepas dari kompleksitas lain yang menyumbang pada aksi-aksi kerusuhan sosial dan tindak kekerasan, faktor agama dianggap paling krusial untuk diperhatikan. Agama selalu mengandung imajinasi yang membuat berbagai nilai menjadi mutlak. Dengan itu, agama juga memproyeksikan, apa yang oleh Karren Armstrong disebut 'perang kosmis'. Sementara itu agama sering membenarkan kekerasan dan kekerasan memperkuat agama, yang dalam kehidupan publik memberikan mercusuar ke arah tatanan moral. Mereka yang menganut pemahaman ini (kaum radikal agama) selalu menempatkan dirinya sebagai paling benar dan memiliki legitimasi ke-Tuhan-an yang sah untuk memusnahkan 'yang lain'.

Pemikiran di atas, diambil dari perspektif kaum radikal. Menurut Arkoun, memahami agama hanya sebagai nalar teologis yang mengagungkan Tuhan dan ritual-ritual, tetapi kurang memperhatikan masalah-masalah kemanusiaan. Hal inilah yang menurut Hassan Hanafi disebut teologi yang berorientasi pada watak antroposentrisme atau menurut Arkoun nalar kritis yaitu sebuah watak yang mengharuskan agama peduli pada masalah pembangunan tata moral masyarakat dan lingkungan. Tuhan tidak memerlukan ritual-ritual manusia. Manusia yang memerlukan ritual-ritual itu sehingga memiliki dampak-dampak bagi kebajikan sosial dan manfaat-manfaat kemanusiaan dalam artinya yang luas. Tidak ada agama yang menganjurkan kekerasan dan menganjurkan kebencian. Kekerasan dan kebencian sering kali hanya imajinasi kelompok-kelompok umat beragama yang merasa terancam oleh modernisasi atau

oleh ideologi lain atau karena pemahaman mereka yang disemangati oleh ideologi perang salib (Baidi, 2011).

Sebagaimana dalam kontekstasi keberagaman di Nusantara yang seringkali terjadi gesekan antara kelompok dengan kelompok yang lain yang mana diantaranya disebabkan oleh perbedaan paham keagamaan dan paradigma berpikir. Kelompok tersebut dapat dipetakan menjadi kelompok eksklusivisme dan kelompok yang lain adalah liberalisme. Eksklusivisme adalah paradigma berfikir yang cenderung tertutup terhadap keanekaragaman, sementara liberalisme adalah sebaliknya, yaitu paham yang memperjuangkan kebebasan di semua aspek. Kedua kelompok tersebut seringkali memperlihatkan wajah Islam yang terkesan kurang bersahaja dan berkerahmatan.

Perseteruan kedua kubu yang sangat berlawanan tersebut menjadi ancaman serius bagi tatanan sosial, baik dalam konteks regional, nasional bahkan internasional, lebih khusus lagi adalah ancaman bagi kebhinekaan di tengah masyarakat yang majemuk. Dampak yang nyata dalam masyarakat akibat dari perseteruan kedua kubu tersebut adalah sejumlah tindakan inteloransi yang terjadi di tengah masyarakat. Hujatan yang mengarah pada anarkisme antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, dan sudah barang tentu rasa persatuan dan kesatuan tergoyak karena perbedaan yang ada disikapi dengan cara yang kurang arif sehingga terkadang tidak lagi menjadi rahmat tapi malah menjadi laknat.

Di tengah kondisi demikian itu, kehadiran moderasi Islam diharapkan dapat memberikan solusi dengan karakter cara beragama yang ditawarkan menjadi solusi. Moderasi Islam tidak berarti bahwa posisi netral yang abu-abu sebagaimana yang sering dialamatkan kepada term tersebut, tidak juga berarti bahwa moderasi Islam diidentik dengan bias paradigma Barat yang cenderung memperjuangkan kebebasan yang tanpa batas, akan tetapi moderasi Islam yang dimaksud adalah nilai-nilai universal seperti keadilan, persamaan, kerahmatan, keseimbangan yang dimiliki oleh agama Islam yang memiliki akar sejarah yang kuat dalam tradisi Nabi dan Sahabat. Moderasi Islam seperti itu kemudian dapat dijumpai dalam tiap disiplin keilmuan Islam, mulai dari aspek akidah, syariah, tasawuf, tafsir hadis dan dakwah (Darlis, 2017).

Moderasi Indonesia sesungguhnya merupakan kontinuitas dari akar masyarakat di Kepulauan ini yang berwatak moderat dan telah mengambil konsensus nasional dalam bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan ber-Bhineka Tunggal Ika sebagai titik temu dari segala arus keindonesiaan. Indonesia dengan keindonesiaannya dalam bangunan kebangsaan seperti dituturkan Reid (2018) merupakan "titik temu persatuan nasional seluruh rakyat Indonesia dari berbagai golongan sebagai era baru". Titik temu merupakan bentuk moderasi dari keragaman, yang satu sama lain saling berkorban atau berbagai dan peduli, yang di dalamnya terdapat toleransi, akomodasi, kerjasama, dan membangun koeksistensi sebagai Bhineka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi satu, sebagaimana tertulis dalam lambang Negara Republik Indonesia, yakni Pancasila (Nashir, 2013).

Dalam konteks kehidupan kebangsaan, moderasi sebagai jalan tengah dari ekstrimitas atau radikal-ekstrem untuk mengembalikan Indonesia dengan seluruh dimensi keindonesiaannya pada proporsi semula sebagaimana fondasi, jiwa, pikiran, dan cita-citanya telah diletakkan oleh para pendiri negara sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang tidak diamandemen karena dipandang sebagai dasar substansi dari Konstitusi UUD 1945. Di tengah pandangan-pandangan yang cenderung radikal atau ekstrem dalam sejumlah atau berbagai aspek keindonesiaan, penting ditarik pada posisi moderat yaitu posisi tengahan dan proporsional mengenai kehidupan kebangsaan sehingga dapat diminimalisasi konflik dan kontroversi di tubuh bangsa dan negara Indonesia (Nashir, 2013).

Karenanya dalam proses moderasi keindonesiaan maka Pancasila harus menjadi titik tumpu yang kokoh agar tetap di tengah dari segala tarik-menarik yang bersifat ekstrem, baik ke kanan maupun ke kiri, sehingga tidak terjadi radikalisasi atau ekstrimisasi terhadap dasar dan ideologi negara tersebut. Pancasila niscaya diposisikan moderat sehingga tidak dibawa ke langit utopia melampaui agama, sebaliknya tidak menjadi serba praktis-teknis dan instrumental layaknya suatu aturan. Pelaksanaan Pancasila pun tidak menjadi jargon dan verbalitas yang kehilangan isi. Pancasila jika dijadikan rujukan sebagai patokan nilai terhadap radikalisme, maka harus berlaku terhadap segala jenis radikalisme. Termasuk dalam menghadapi radikalisme neo-liberal, radikalisme agama, radikalisme sekuler, radikalisme ultra-nasionalisme, radikalisme kanan maupun kiri, yang menyebabkan Indonesia dan kelima sila Pancasila semakin jauh panggang dari api (Nashir, 2013).

Hilmy mengidentifikasi beberapa karakteristik penggunaan konsep moderasi dalam konteks Islam Indonesia, diantaranya: (1) Ideologi tanpa kekerasan dalam menyebarkan Islam; (2) Mengadopsi cara hidup modern dengan semua turunannya, termasuk sains dan teknologi, demokrasi, hak asasi manusia dan sejenisnya; (3) Penggunaan cara berfikir rasional; (4) Pendekatan kontekstual dalam memahami Islam, dan (5) Penggunaan ijtihad (kerja intelektual untuk membuat opini hukum jika tidak ada justifikasi eksplisit dari Al Qur'an dan Hadist).

Lima karakteristik tersebut bisa diperluas menjadi beberapa karakteristik yang lain seperti toleransi, harmoni dan kerjasama antar kelompok agama (Hilmy, 2013).

Dalam konteks ini moderasi Islam yang ramah, toleran, terbuka, fleksibel dapat menjadi jawaban terhadap kekhawatiran konflik yang marak terjadi di tengah masyarakat multikultural. Moderasi Islam tidak berarti bahwa mencampuradukkan kebenaran dan menghilangkan jati diri masing-masing. Juga tidak berarti bahwa tidak memiliki sikap yang jelas dalam sebuah persoalan. Tapi moderasi Islam lebih pada sikap keterbukaan menerima bahwa diluar diri (eksternal) ada saudara yang juga memiliki hak yang sama sebagai masyarakat yang berdaulat dalam bingkai kebangsaan. Di luar agama seseorang, ada saudara yang beragama lain yang mesti dihormati dan diakui keberadaannya. Di luar kultur bahasa, adat, dan suku seseorang ada ribuan suku, bahasa dan adat yang berbeda yang tentu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dengan keyakinan itulah akan mengantarkan kepada sikap keterbukaan, toleran, dan fleksibel dalam bertingkah. Berlaku adil atas sesama tanpa harus melihat latarbelakang agama, ras, suku dan bahasa. Itulah inti daripada moderasi Islam yang telah dicontohkan oleh para pendahulu, mulai dari masa Nabi, sahabat, para ulama termasuk ulama nusantara.

SIMPULAN

Moderasi beragama di Indonesia adalah konsep yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan beragama di tengah masyarakat yang majemuk. Indonesia, dengan beragam agama dan kepercayaan, memiliki tantangan untuk mempertahankan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Moderasi beragama di Indonesia berfungsi sebagai pilar untuk menjaga harmoni, stabilitas, dan persatuan di tengah keragaman agama dan budaya yang ada, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif ekstremisme.

REFERENSI

- Abdurrohman, Asep, "Eksistensi Islam Moderat dalam Perspektif Islam", dalam *Rausyan Fikr*, Vol. 14 No. 1 Maret 2018.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Islam Jalan Tengah: Menjauhi Sikap Berlebihan dalam Beragama*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017).
- Assyaukanie, Luthfi, *Ideologi Islam dan Utopia; Tiga Model Negera Demokrasi di Indonesia*, terj. Samsudin Berlian. Cet. ke-1. (Jakarta: Freedom Institute, 2011).
- Baidi, Agama dan Multikulturalisme: Pengembangan Kerukunan Masyarakat Melalui Pendekatan Agama, dalam *Millah* Edisi Khusus Desember 2010.
- Berger, Peter L. dan Thomas Lukcmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, (Jakarta: LP3ES, 1990).
- Darlis, "Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural", dalam *Rausyan Fikr*, Vol. 13 No.2 Desember 2017.
- Darlis, "Peran Pesantren As'adiyah dalam Membangun Moderasi Islam di Tanah Bugis", dalam *Al-Misbah*, Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2016.
- Departemen Agama RI, *Moderasi Islam*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012).
- Editorial Team. (n.d.), *Keragaman Indonesia*, dari https://www.indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/keragaman_indonesia, [data diakses 5 Juni 2020](#).
- George, Cherian, *Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi*. Terj. Tim PUSAD Paramadina dan IIS UGM. Jakarta: PUSAD Yayasan Paramadina, 2017.
- Ghufron, Fathorrahman, *Ekspresi Keberagamaan di Era Milenium*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016).
- Hanapi, Mohd Shukri, "The Wasatiyyah (Moderation) Concept in Islamic Epistemology: A Case Study of its Implementation in Malaysia," *International Journal of Humanities and Social Science*. Vol. 4. No. 9. Juli 2014.
- Heriyanto, D, Q &A: "Indonesia's native faiths and religions", dalam *The Jakarta Post*, diakses dari <https://www.thejakartapost.com/academia/2017/11/14/qaindonesias-native-faiths-and-religions.html>, 15 Juli 2020.
- Hilmy, Masdar, "Whither Indonesia's Islamic Moderatism? A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU", dalam *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 07, Number 01, June (Surabaya: the Institute for the Study of Religion and Society (LSAS) and the Postgraduate Program (PPs), IAIN Sunan Ampel, 2013).
- Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).
- Mas'ud, Abdurrahman, (2006), *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*, Jakarta: Kencana.

- Mas'ud, Abdurrahman, *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Mun'im DZ, Abdul, "Pergumulan Pesantren dengan Kebudayaan", dalam Badrus Sholeh (ed.), *Budaya Damai Komunitas Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 2007).
- Nashir, Haedar, *Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan Perspektif Sosiologi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar.
- Sedyawati, Edi, *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007).
- Setiawan, Nur Kholis, *Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, Yogyakarta: Kaukaba, 2012.
- Sumber: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2017/01/16/276/pada-2016-intoleransi-meningkat.html> diakses 30 Juni 2020.
- Sutrisno, Edy, "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan", dalam *Jurnal Bimas Islam*, Vol 12 No. 1.
- Tim Penulis Alumni Timur Tengah, *Konstruksi Islam Moderat "Menguak Prinsip Rasionalitas, Humanitas, dan Universalitas Islam"*, (Makassar: ICATT Press, 2012).
- Umar, Nasaruddin, *Deradikalisasi Pemahaman al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: PT. Elex Media Kompotindo, 2014).
- Umar, Nasaruddin, *Deradikalisasi Pemahaman al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: PT. Elex Media Kompotindo, 2014).
- Wilson, Bryan, *Religion In Secular Society*, (Penguin Books, Middlesex-England, 1966).